

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

USAHA KANTOR BANK INDONESIA (KBI)

PEKANBARU DALAM MENJAGA KEASLIAN UANG RUPIAH

DARI PEMALSUAN

Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Tugas-Tugas Akademik dan
Memperoleh Gelar Ahli Madya



HEFRIZAL
00772000033

PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYSRIF KASIM

PEKANBARU

RIAU-2010

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	3
D. Metode Pelaporan.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5

BAB II : SUMBER REFERENSI

A. Pengertian Perbankan.....	7
B. Landasan Hukum Perbankan.....	10
C. Fungsi Bank Sentral.....	10
D. Pengertian Uang.....	12
E. Pandangan Islam Tentang Uang.....	13
F. Syarat-Syarat Benda yang Berfungsi Sebagai Uang.....	14
G. Fungsi Uang.....	15
H. Jenis-Jenis Uang.....	17
I. Peranan Uang.....	17

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya Bank Indonesia.....	19
B. Visi dan Misi Perusahaan.....	21
C. Status Dan Tempat Kedudukan.....	22

D. Aktivitas Perusahaan.....	23
E. Struktur Organisasi.....	25

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Usaha kantor bank Indonesia pekanbaru dalam menanggulangi pemalsuan uang rupiah	26
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	35
B. Saran-Saran.....	36

DAFTAR PUSATAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh satu negara kepada negara lainnya.

Karena mengingat dalam semua kegiatan transaksi ekonomi suatu negara, keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sangat sulit dihindari karena uang memiliki fungsi yang sangat strategis dalam kelangsungan suatu pemerintah atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena selain uang dapat dijadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, uang juga dapat dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang pada suatu negara tetap pada fungsinya sesuai dengan tujuannya maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif.

Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang mencetak dan mengedarkan uang rupiah serta mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengamankan uang rupiah dari pemalsuan, maka dalam rangka melakukan pemberantasan terhadap uang palsu, Bank Indonesia senantiasa mengupayakan agar uang yang diedarkan terjaga kualitasnya. Upaya tersebut dilakukan dengan menarik dan memusnahkan uang yang tidak layak edar serta menggantikannya dengan uang yang

layak edar. Disamping itu, Kantor Bank Indonesia Pekanbaru juga melakukan penelitian terhadap bahan dan unsur pengaman uang dalam upaya memperpanjang masa edar uang. Dibawah ini adalah data jumlah temuan uang palsu yang beredar tahun 2008-2009 oleh Bank Indonesia cabang pekanbaru.

Tabel 1.1. data jumlah temuan uang palsu terhadap uang kertas yang diedarkan di pekanbaru priode 2008-2009

Tahun	Jumlah (Lembar)	Rincian (Lembar)
Tahun 2008	39 lembar	28 lembar pecahan 100.000 11 lembar pecahan 50.000
Tahun 2009	50 lembar	37 lembar pecahan 100.000 13 lembar pecahan 50.000

Sumber : Bank Indonesia (2008-2009)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2008 ditemukan uang palsu yang beredar sebanyak 39 lembar (28 lembar pecahan 100.000 dan 11 lembar pecahan 50.000), dan pada tahun 2009 jumlah uang palsu yang ditemukan 50 lembar (37 lembar pecahan 100.000 dan 13 lembar pecahan 50.000). Guna menekan peredaran uang palsu itu, Bank Indonesia Pekanbaru telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat bisa membedakan mana uang palsu dan mana uang asli. Dengan demikian peredaran uang palsu di tengah-tengah masyarakat nantinya akan bisa ditekan sekecil mungkin.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan uang rupiah di Pekanbaru dengan judul: **“USAHA KANTOR BANK INDONESIA (KBI)**

PEKANBARU DALAM MENJAGA KEASLIAN UANG RUPIAH DARI PEMALSUAN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) Pekanbaru sebagai berikut:

“Bagaimana usaha Kantor Bank Indonesia (KBI) Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang rupiah di Kota Pekanbaru”.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Usaha Kantor Bank Indonesia Pekanbaru dalam menanggulangi pemalsuan uang rupiah.

2. Manfaat Penulisan

- a. Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.
- b Untuk memenuhi syarat study akhir program Diploma III Manajemen Perusahaan.
- c. Sebagai sumber informasi dan bahan penelitian bagi pihak-pihak lain untuk melakukan penelitian selanjutnya.

- d. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis tentang Usaha Kantor Bank Indonesia Pekanbaru dalam menanggulangi pemalsuan uang rupiah.

D. Metode Laporan

1. Lokasi dan Waktu Laporan

Penelitian dilakukan di Kantor Bank Indonesia Pekanbaru yang terletak di jalan Sudirman No. 464 Pekanbaru, yang merupakan Bank Sentral Republik Indonesia. Laporan ini dilakukan selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada perusahaan tersebut mulai awal Juli sampai akhir Agustus 2009.

2. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis mendapat data yang berasal dari dokumen maupun keterangan lisan yang diberikan oleh pegawai Bank Indonesia khususnya pada bagian KAS dan karyawan atau pegawai Bank Indonesia pada bagian yang lain seperti pegawai Bank Indonesia pada bagian SDM, SKEM, TPB, KLIRING, dan PKM.

Dalam rangka memperoleh data dalam laporan ini penulis menggunakan data penelitian sebaga berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak lokasi penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara kepada pegawai Bank Indonesia.

b. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari pihak lokasi penelitian, seperti struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan cara menginterview langsung kepada kepala bagian divisi KAS dan pegawai Bank Indonesia pada bagian yang lain, tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Disamping itu, teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul, kemudian dirangkai dengan bermacam-macam teori pendukung.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis membaginya menjadi beberapa bab dan masing-masing bab dibagi sub bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat pelaporan serta sistematika penulisan,metode penulisan.

BAB II : REFERENSI

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian perbankan, landasan hukum perbankan, definisi uang, jenis-jenis uang, dan peran uang.

BAB III : GAMBARAN UMUM BANK INDONESIA.

Dalam bab ini, diuraikan mengenai sejarah singkat berdirinya Bank Indonesia, struktur organisasi kantor cabang Bank Indonesia Pekanbaru dan, aktivitas-aktivitas di KBI-Pekanbaru, visi dan misi Bank Indonesia, status dan tempat kedudukan kantor Bank Indonesia Pekanbaru.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis membahas mengenai hasil pelaporan dan pembahasan masalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis mencoba membuat beberapa kesimpulan dari seluruh analisis dan penilaian yang telah dilakukan dalam pembuatan laporan ini, kemudian mengemukakan saran-saran yang tentunya diharapkan bermanfaat bagi semua pembaca khususnya penulis.

BAB II

REFERENSI

A. Pengertian Perbankan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berazaskan demokrasi ekonomi, menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan. Sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara sederhana Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Kemudian menurut undang-undang No. 10 tahun 1988 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan dalam bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dalam praktiknya bank dibagi dalam beberapa jenis. Jika di tinjau dari segi fungsinya bank dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:

1. Bank Sentral.
2. Bank Umum.
3. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Sentral merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. Disetiap negara hanya ada satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya.

Bank Sentral adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan moneter melalui pengendalian moneter secara umum dan pengendalian kredit secara selektif.

Bank Sentral dalam pengertian umum adalah sebuah lembaga yang disertai tugas untuk mengontrol sistem keuangan dan perbankan, dalam menjalankan peranannya itu Bank Sentral diberi monopoli untuk mengeluarkan uang dan wewenang *prerogative* untuk mengatur jumlah uang yang beredar. (Didik j & suwidi, 2000:72)

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. (Kasmir, 2002:11-20)

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menghimpun dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. (Booklet, perbankan Indonesia : 2006: 5)

Peranan bank dalam masyarakat sebagai suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. (Muchdarsyah Sainungan, 2000:3)

Fungsi bank dalam menjalankan operasinya sebagai lembaga keuangan adalah:

1. *Agen of trust* atau kepercayaan. Bank baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana harus menjadi kepercayaan atau konsumennya dalam melakukan setiap transaksinya.
2. *Agen of servis*. Disamping menghimpun dana bank juga dapat melakukan transaksi jasa yang lain untuk melakukan pelayanan kepada nasabahnya.
3. *Agen of development*. Bank merupakan pembangunan sektor perekonomian yaitu sektor moneter dan sektor riil, sektor ini tidak dapat dipisahkan dalam kegiatannya. (Budi Agus Riswandi, 2005:9)

B. Landasan Hukum Perbankan

Bank Indonesia sebagai lembaga yang independent berlandaskan pada undang-undang:

- 1.UU RI No.7 Thn 1992/ UU No.10 Tahun 1998.
- 2.UU RI No.23 Thn 1999/ UU RI No.Tahun 2004.(UU BI: 2006: 4)

C. Fungsi-fungsi bank sentral pada umumnya sebagai berikut:

(a) Memegang Deposito Milik Bank-bank Lain

Ini merupakan cadangan milik bank-bank. perusahaan atau perseorangan memelihara rekening giro pada bank-bank umum untuk memudahkan transfer pembayaran. Sedangkan bank sentral hanya menerima setoran rekening giro oleh bank-bank lain. Bank ini akan menyetorkan kelebihan kas serta menariknya kembali bila mereka memerlukan. Di samping itu dalam rangka mengatur jumlah uang beredar yaitu untuk uang giral, bank-bank umum diwajibkan memelihara cadangan minimum pada bank sentral.

(b) Mengedarkan uang karta, yaitu uang kertas dan uang logam

Bilamana dirasakan bahwa perekonomian memerlukan lebih banyak uang beredar untuk mengadakan transaksi maka bank sentral menambah jumlah uang beredar, dan begitu sebaliknya. Dalam hubungan ini bank sentral juga berfungsi sebagai “bankirnya bank-bank” atau sebagai “sumber pinjaman terakhir”. Bank-bank umum dan

bank-bank lain dapat meminjam dari bank sentral. Ia mampu memberikan pinjaman seperti ini karena ia juga berfungsi mengedarkan uang kartal yang jumlahnya menurut persetujuan pemerintah.

(c) Mengatur dan Mengendalikan Jumlah Uang Beredar atau Penawaran Uang

Ini merupakan fungsi bank sentral terpenting. Bank berfungsi mengendalikan jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan perekonomian sebagai keseluruhan. Jumlah uang yang beredar harus dijaga agar konsisten dengan kenaikan output total nasional dan tingkat harga yang relatif stabil, melalui kebijakan pengendalian kredit kualitatif dan kuantitatif dalam usaha untuk memanipulasi jumlah uang beredar untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

(d) Bertindak Sebagai Lembaga Kliring

Cek merupakan surat perintah kepada suatu bank untuk membayar seseorang atau pihak lain dengan dana simpanan giro milik penulis cek tersebut. Bila pembayaran dan penerima mempunyai rekening simpanan pada bank yang sama, ini dilaksanakan hanya dengan cara pemindahbukuan yaitu dengan mengurangi rekening simpanan giro milik si pembayar (penulis atau penarik cek) dan menambahkan ke dalam rekening giro milik penerima pembayaran. Tetapi bila pihak pembayar serta penerima pembayaran dalam transaksi tersebut

mempunyai rekening giro pada bank yang berbeda maka transaksi harus diselesaikan dengan proses kliring lewat bank sentral.

(e) Sebagai Lembaga Keuangan/Fiskal Pemerintah

Setiap tahun pemerintah memungut dan mengumpulkan penerimaan pajak serta pungutan-pungutan lain dalam jumlah besar sekali. Pemerintah memelihara rekening Koran pada bank sentral untuk menampung dan membukukan semuanya.

(f) Mengawasi dan Memandu Bank-bank

Bank sentral mengawasi dan memandu bekerjanya bank-bank. Sistem perbankan tergantung pada situasi finansial dan operasi bank-bank secara individual. Situasi finansial dan operasional tak sehat akan mengancam struktur finansial seluruh perekonomian. Karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap operasi sistem perbankan demi kepentingan umum oleh pemerintah melalui dan dilaksanakan oleh bank sentral.

D. Pengertian Uang

Secara sederhana uang diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima oleh umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar menukar. Sedangkan uang palsu adalah hasil perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.

Secara umum uang didefinisikan sebagai alat tukar, karena itu segala yang dapat bertindak sebagai alat tukar umum yang disebabkan alat itu dapat diterima sebagai alat penyelesaian utang, maka dapat dianggap uang. (Kasmir, 2004:11-25)

Uang yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang bisa diterima oleh umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar menukar. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa uang adalah segala sesuatu yang mendapat pengakuan secara umum dan dapat dijadikan alat pembayaran.

E. Pandangan Islam tentang Uang

Manusia sebelum menemukan uang sebagai alat tukar, aktivitas ekonomi dilakukan dengan menggunakan sistem barter. Sistem ini merupakan sistem yang pertama kali dikenal dalam perdagangan dunia, hal ini jauh sebelum abad VII M. dalam prakteknya sistem barter banyak menghadapi kendala dalam kegiatan perdagangan dan bisnis. Kendala-kendala itu antara lain:

1. sulit menemukan orang yang diinginkan.
2. sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan.
3. sulit menentukan orang yang mau menukar barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya.
4. sulit menentukan kebutuhan yang akan ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan, artinya untuk memperoleh barang yang diinginkan memerlukan waktu yang terkadang relatif lama.

Rasulullah SAW menyadari akan kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan akan sistem pertukaran ini, lalu beliau ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Adapun motif permintaan akan uang dalam islam adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*). Perbedaan yang principle diantara kedua konsep ekonomi tersebut, antara lain yaitu bahwa menurut islam uang adalah milik umum (*public good*), sedangkan dalam ekonomi konvensional adalah milik pribadi (*private good*). (Mawardi, 2007:43)

Dalam islam uang harus senantiasa terus berputar secara alami dalam perekonomian, semakin cepat uang berputar dalam perekonomian maka akan semakin tinggi pendapatan masyarakat, dan akan semakin baik perekonomian.

F. Syarat-syarat benda yang berfungsi sebagai uang

Suatu benda untuk dapat diterima sebagai uang harus memenuhi beberapa persyaratan- persyaratan.

Persyaratan –persyaratan itu adalah sebagai berikut:

- a. Disukai oleh umum (*acceptability*) artinya diterima secara umum penggunaannya.
- b. Mudah disimpan artinya menyimpannya tidak sulit.
- c. Mudah diangkut atau dibawa.
- d. Mudah dibagi-bagi artinya mudah diatur pembagiannya.
- e. Harus bisa mencukupi kebutuhan perekonomian.
- f. Mempunyai kestabilan nilai.

- g. Tidak mudah rusak artinya uang itu secara fisik tidak mudah rusak atau robek yang bisa mengganggu nilai uang tersebut.
- h. Harus ada kontinuitas penggunaan uang tersebut yaitu tidak dalam waktu yang relatif singkat diganti-ganti sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap uang.

G. Fungsi Uang

Pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat memperlancar, namun seiring dengan perkembangan zaman fungsi uang pun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi, sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi pengguna uang. (Kasmir, 2002:16-17)

Sesuai dengan fungsi pokoknya, uang ditunjukkan untuk dijadikan alat utama dalam memperlancar perdagangan. Uang mempunyai satu fungsi pokok dalam sistem perekonomian, yaitu memudahkan pertukaran barang dan jasa. Beragamnya fungsi uang berakibat penggunaan uang yang semakin penting dan semakin dibutuhkan dalam berbagai kegiatan masyarakat.

Sehubungan dengan tujuan tersebut, maka uang dapat melaksanakan empat fungsi khusus, yaitu:

- a. Uang sebagai alat tukar menukar

Dengan adanya uang, pertukaran dua macam barang atau lebih tidak perlu dilakukan secara langsung pada saat yang bersamaan (secara barter) karena semua barang dapat diukur nilainya dalam mata uang

yang berlaku. Hal tersebut telah dirasakan dapat memperlancar proses penukaran, mendorong spesialisasi kerja dan menumbuhkan pasar barang atau pasar jasa. Dalam hal ini uang telah berfungsi sebagai alat tukar menukar (*medium of exchange*).

b. Uang sebagai alat satuan hitung.

Penilaian atas suatu barang atau jasa dapat dinyatakan dalam satuan uang sehingga sangat mempermudah perbandingan nilai dari berbagai macam dan jumlah dari barang atau jasa. Dalam hal ini uang telah berfungsi sebagai alat satuan hitung (*unit of account*).

c. Uang sebagai alat penimbun kekayaan.

Disamping itu uang mempermudah perbuatan menabung karena orang tidak perlu lagi menumpuk kekayaan dalam bentuk barang yang menimbulkan masalah tempat penyimpanan dan resiko yang tinggi. Dalam hal ini uang telah berfungsi sebagai alat penyimpanan kekayaan.

d. Uang sebagai alat penyelesaian hutang piutang.

Dengan adanya uang, transaksi pinjam meminjam antara pihak yang berlebihan (*surplus unit*) dengan adanya pihak yang kekurangan (*deficit unit*) dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dalam hal ini uang telah berfungsi sebagai alat penyelesaian hutang piutang (*standar of deferred payments*). (Bank Indonesia, 2005:1)

H. Jenis-Jenis Uang

Jenis-jenis uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu: Uang kartal dan uang giral

- a. Uang kartal (sering pula disebut sebagai common money) Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari.
- b. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposito*) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Uang giral terdiri dari cek dan giro. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek. (Syaril dan Djasni, 1999:30)

I. Peranan Uang

Dalam masyarakat yang masih primitif belum terdapat pembagian kerja, Sedangkan pada tingkat yang lebih maju dimana dalam masyarakat sudah dilakukan tukar menukar, telah mulai tampak adanya spesialisasi pekerjaan. Tidak seluruh kebutuhan harus diproduksi oleh masing-masing individu dalam masyarakat, sebagaimana dalam masyarakat yang masih primitif.

Dengan adanya uang telah terlaksananya pembagian kerja yang lebih sempurna seperti yang kita temui sekarang ini. Dalam masyarakat yang sudah bisa mempergunakan uang sebagai alat penukar, hampir tidak lagi seseorang yang

menghasilkan sesuatu barang dari proses produksi yang pertama hingga menjadi bahan jadi. Dengan demikian uang telah mengambil peranan yang amat penting dalam proses terciptanya spesialisasi yang sangat jauh.

Uang mempunyai peranan penting dalam didalam perekonomian, terutama dalam produksi, pertukaran dan konsumsi pada masyarakat.

Uang merupakan alat penukar dan pembayaran transaksi komersial dan financial. Uang menjadi pendorong kemajuan perekonomian dan perdagangan nasional dan internasional. Globalisasi perekonomian dapat terjadi berkat peranan uang. (Hasibuan,2006:6)

Kata mantan Presiden AS Harry Truman “siapa yang menguasai uang pasti menguasai politik” sejarah membuktikan uang dan politik tidak dapat dipisahkan. Pada masyarakat manapun didunia pasti membutuhkannya karena uang adalah medium yang signifikan yang mampu mengendalikan energi dan sumberdaya lain. (Ismawan, 1999:8)

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral didirikan pada tanggal 1 Juli 1953, berdasarkan undang-undang pokok Bank Indonesia atau UU. No. 11 tahun 1953. Hampir delapan tahun sesudah kemerdekaan negara kita. Kelahiran Bank Indonesia ini karena proses nasionalisasi *De Javasche Bank NV*, sebuah Bank yang pada masa pemerintah Belanda, masa kolonial diberi tugas pemerintahan Belanda sebagai sirkulasi Hindia Belanda dan berdasarkan keputusan KMB 1949 ditunjuk lagi sebagai Bank Sentral. Sejak tahun 1946 Bank Negara Indonesia (BNI) ditetapkan pula oleh pemerintah sebagai Bank Sentral.

Cita-cita untuk mendirikan Yayasan Pusat Bank Indonesia, pada tanggal 09 Oktober 1945, sebagai langkah pertama untuk membentuk satu-satunya bank sirkulasi sebagaimana yang telah ada pada zaman Hindia Belanda dan Bank Sentral yang sebelumnya memang belum ada di Indonesia. Yayasan Pusat Bank Indonesia tersebut dilebur menjadi Bank Negara Indonesia (BNI) yang ditetapkan dan diharapkan dapat bekerja sebagai Bank Sentral milik Negara Republik Indonesia. Karena berbagai factor BNI ternyata tidak berkesempatan untuk menyelenggarakan fungsi yang dipikulkan kepadanya (pasal 23 UUD 1945) tercantum suatu maksud untuk segera membentuk sebuah bank. Bank yang bernama Bank Indonesia (BI), yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas dengan suatu undang-undang.

Sebagaimana telah disinggung diatas keputusan Konfrensi Meja Bundar (KMB) perintah De Javasche Bank, demikian pula fungsi formal yang diemban oleh BNI belum dapat dilaksanakan, maka Bank Indonesia sebenarnya melanjutkan peranan De Javasche Bank pada zaman Hindia Belanda dengan fungsi formal BNI sesudah kemerdekaan. Undang-undang pokok Bank Indonesia tahun 1953 yang telah disahkan parlemen yang dibentuk Bank Indonesia.

Sejarah Bank Indonesia tak lepas dari sejarah pendahulunya yaitu De Javasche Bank pada zaman kolonial Belanda dan BNI pada masa kemerdekaan dan hal ini akan membantu pemahaman masyarakat mengenai Bank Indonesia selanjutnya dalam proses pembangunan. Bank Indonesia ikut memberikan andil terhadap politik perekonomian nasional.

Bank Indonesia adalah sebuah bank yang didirikan dalam konteks perekonomian negara-negara yang sedang berkembang, karena ia berbeda dengan bank-bank sejenis di negara-negara industri maju saat ini. Dimana Bank Sentral dibatasi peranan perkreditannya hanya *bankers* dan *lender of the last resort*. Maka Bank Indonesia kiprahnya dalam beberapa periode ikut aktif dalam pemberian kredit secara langsung.

Hal ini tidak saja untuk ikut berbagai krisis, melainkan juga dapat membantu tugas pemerintah memperkuat sektor negara dengan pasal 33 UUD 1945 maupun dalam mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi masyarakat yang masih lemah, dengan kata lain Bank Indonesia juga telah bertindak sebagai alat pembangunan (Agen Of Depelopment) walaupun luas dan

kedalaman peranannya berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dari waktu ke waktu.

B. Visi Dan Misi

o Visi Bank Indonesia.

“Menjadi lembaga Bank Sentral yang dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi rendah dan stabil.”

Pernyataan visi cukup penting bagi Bank Indonesia karena dapat:

1. Memperjelas arah organisasi ke depan.
2. Memotivasi anggota dewan gubernur dan pegawai Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
3. Mengkoordinasikan tindakan serta kebijakan dari anggota dewan gubernur dan pegawai secara lebih efisien dan efektif.
4. Memberikan keyakinan dalam pencapaian misi organisasi.

o Misi Bank Indonesia.

“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional yang panjang berkesinambungan.”

Perumusan misi dimaksud diharapkan dapat membantu organisasi dalam:

1. Menetapkan dan menjaga konsistensi, serta kejelasan tujuan organisasi.

2. Memberikan referensi untuk perencanaan dan proses pengambilan keputusan.
3. Memperoleh dukungan dan pengertian dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan tugas organisasi. (Veithzal, 2007:55-56)

C. Status Dan Tempat Kedudukan.

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia, yang merupakan lembaga yang pemerintah atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Bank Indonesia berkedudukan di Ibu kota negara. Di Indonesia, bank sentral berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor di seluruh wilayah Indonesia (biasanya di tiap-tiap ibukota Propinsi) serta perwakilan-perwakilan dan koresponden di luar negeri. Bank Indonesia memiliki salah satu Kantor Bank Indonesia yang beralamat jalan Sudirman No. 464 Pekanbaru.

Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp.2.000.000.000.000; (Dua Triliun Rupiah) dan modal tersebut harus ditambah sehingga menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter dengan dana yang berasal dari cadangan umum atau dari hasil revaluasi asset. Tata cara penambahan modal dari cadangan umum atau hasil revaluasi asset ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur.

D. Aktivitas-Aktivitas di Kantor Cabang Bank Indonesia Pekanbaru

1. Bagian Sumberdaya Manusia

Bagian ini memiliki aktivitas administrasi personalia, yang menyangkut tentang karyawan, gaji (kompensasi), jenjang karir.

2. Tim Pengawas Bank

Bagian ini merupakan aktivitas Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam Pengaturan dan pengawasan perbankan.

3. Akunting/kliring

Aktivitas dari bagian ini adalah menyangkut keuangan dan kliring atau pertukaran warkat antar bank.

4. Kas

Bagian ini mempunyai aktivitas menyeleksi uang kertas dan uang logam yang masuk dan yang keluar dari Kantor Bank Indonesia Pekanbaru.

5. SKEM (seksi Kebijakan Moneter)

Bagian ini merupakan aktivitas Bank Indonesia yang memberikan informasi tentang statistik dan Ekonomi Moneter.

6. PKM (Seksi pelaksanaan Kebijakan Moneter)

Bagian ini merupakan aktivitas Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter.

7. Struktur Organisasi.

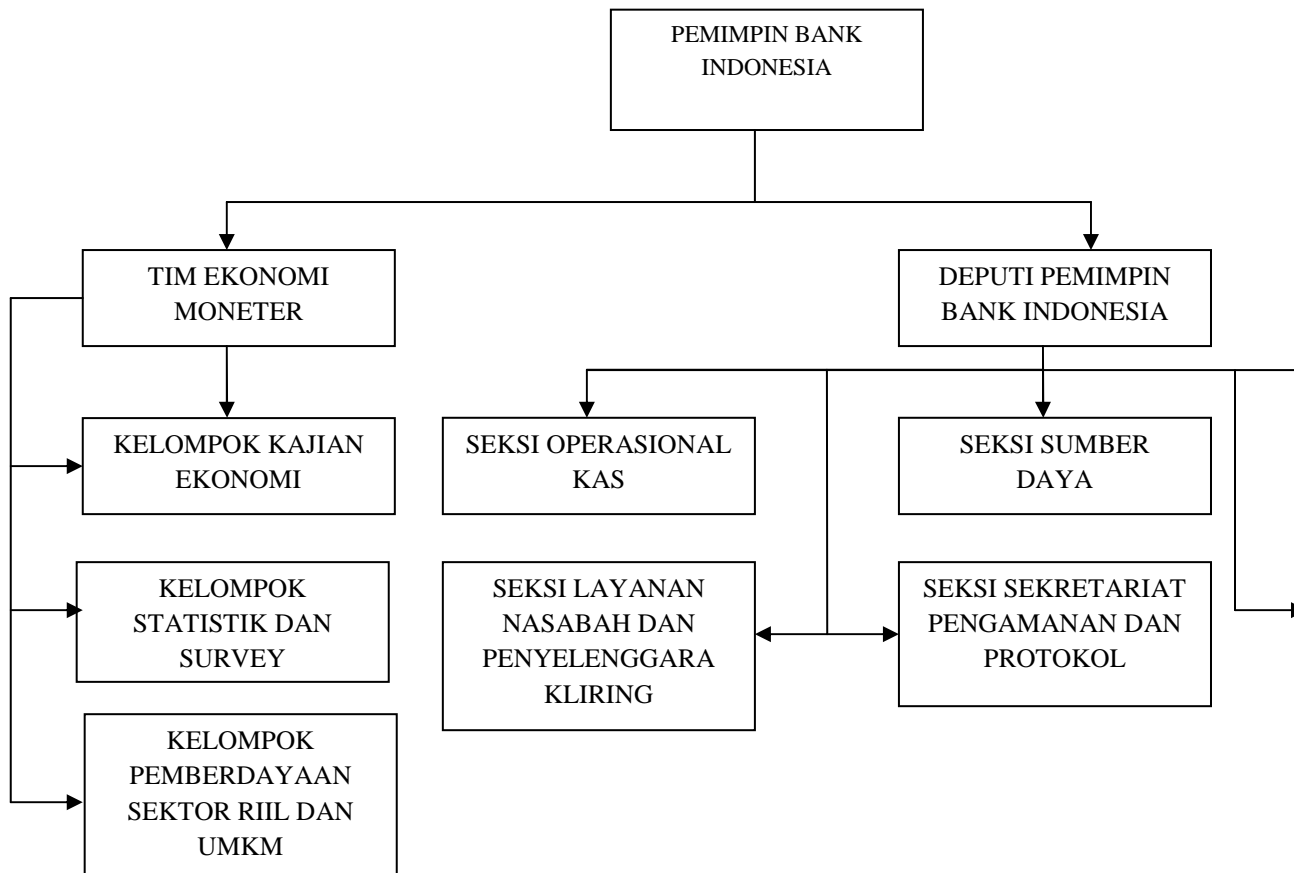
- a. Struktur Organisasi kantor Cabang Bank Indonesia Pekanbaru.
- b. Struktur Organisasi Bank Indonesia.

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, Seorang Deputy Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputy Gubernur yang diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Struktur organisasi Bank Indonesia dari 21 Direktorat, 2 Biro yang berdiri sendiri dan 5 Biro dalam koordinasi Direktorat, 4 Unit khusus dan 1 pusat pendidikan dan studi kebanksentralan di kantor pusat. Kemudian 37 kantor Bank Indonesia (KBI), dan 4 kantor perwakilan (KPW) masing-masing di New York, London, Tokyo dan Singapura.

Secara garis besar tugas Bank Indonesia dilaksanakan melalui 4 sektor satuan kerja, KBI dan KPW yang kesemuanya bertanggung jawab kepada Dewan Gubernur.

Gambar 1.1. STRUKTUR ORGANISASI DAN JABATAN KANTOR BANK INDONESIA PEKANBARU



Sumber: Kantor Bank Indonesia Pekanbaru 2009

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Usaha Kantor Bank Indonesia Pekanbaru dalam Menanggulangi Pemalsuan Uang Rupiah

Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat telah secara tegas dikatakan bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Maraknya peredaran uang palsu dalam masyarakat dapat dikatakan merupakan akibat dari rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seperti juga diketahui bahwa hampir sekitar 80 % dari 200 juta penduduk Indonesia adalah golongan ekonomi lemah.

Negara Indonesia telah menunjukkan eksistensinya sebagai negara demokrasi ekonomi. Disini diharapkan bahwa perekonomian nasional dibangun dari, oleh dan untuk rakyat. Setiap elemen dan unsur yang dibentuk sedapat mungkin melibatkan masyarakat sebagai komponen utama. Hal ini juga telah diperkuat dengan arah kebijakan perekonomian nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan penerbitan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah bagi masyarakat dengan nilai nominal yang bervariasi, yakni : Rp. 100.000,00; Rp. 50.000,00; Rp. 20.000,00; Rp. 10.000,00; Rp. 5.000,00; Rp. 1.000,00; Rp. 500,00; Rp. 200,00; Rp. 100,00; Rp. 50,00

Mata uang rupiah tersebut telah ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah dan umum digunakan oleh masyarakat. Bank Indonesia sendiri telah menerbitkan uang tersebut dalam 2 bentuk, yakni mata uang kertas dan mata uang logam. Hal ini dilakukan

selain untuk memudahkan masyarakat dalam mempergunakannya juga dimaksudkan untuk memberikan variasi bentuk pada mata uang yang digunakan di Indonesia.

Namun seperti kita ketahui bahwa usaha-usaha tersebut seolah-olah tidak berarti dengan maraknya peredaran uang palsu. Uang-uang tersebut beredar dengan cara-cara yang bervariasi seperti melalui transaksi jual beli, penukaran mata uang, maupun melalui penyelundupan antar negara. Jumlah nominal uang yang dipalsukan juga tidak tanggung-tanggung.

Umumnya para pelaku lebih mengincar mata uang dengan nilai nominal yang tinggi untuk dipalsukan, seperti mata uang Rp. 100.000,00, Rp. 50.000,00 serta Rp. 20.000,00. Selain dipandang lebih menguntungkan karena nilai nominalnya yang besar, pembuatan uang palsu tersebut juga sebanding dengan ongkos produksi yang dikeluarkan. Sehingga para pelaku tetap memperoleh keuntungan yang menjanjikan.

Proses globalisasi yang mendunia akan membawa pengaruh yang sangat luas. Adanya perubahan tersebut akan memaksa suatu bangsa untuk mengikuti arus perkembangan jaman. Proses transfer teknologi, komunikasi dan transportasi menjadi begitu mudah dan cepat. Adanya keinginan dari negara-negara maju untuk mengembangkan bisnis dan usahanya telah mendorong proses alih teknologi menjadi semakin cepat.

Sehingga tidak mengherankan bahwa perangkat seperti komputer, *internet* maupun *faximile* sudah sangat umum dikenal oleh masyarakat. Kita dapat mengamati bahwa salah satu faktor pendorong munculnya kejahatan uang palsu ini adalah karena semakin canggihnya teknologi yang ada saat ini. Berbekal kemampuan mengoperasikan komputer inilah para pelaku tindak pidana pemalsuan uang memulai aksinya. Mereka

mampu menghasilkan uang palsu yang mirip dengan mata uang yang asli jika kita lihat secara sepintas.

Dalam rangka mengantisipasi ancaman tindak pidana pemalsuan uang rupiah, Bank Indonesia telah melakukan usaha-usaha yang baik yaitu yang bersifat preventif maupun bersifat represif.

1. Tindakan yang bersifat preventif

Tindakan preventif adalah tindakan pencegahan tindak pidana pemalsuan uang rupiah. Tindakan yang bersifat preventif meliputi :

1. Memasyarakatkan ciri-ciri keaslian uang rupiah.
2. Meningkatkan tanda-tanda pengaman pada uang rupiah baru.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
4. Meningkatkan kerjasama internasional.

Bank Indonesia mengharapkan masyarakat mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah, bank indonesia juga memberikan tips membedakan uang asli dan uang palsu dan cara pelaporan penemuan uang palsu. Dibawah ini akan di jelaskan secara singkat.

1.1 Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah dan meningkatkan tanda-tanda pengaman pada uang rupiah baru.

Keaslian uang rupiah dapat dikenali melalui ciri-ciri yang terdapat baik pada bahan yang digunakan untuk membuat uang (kertas, plastik atau logam). Desain dan warna masing-masing pecahan uang, maupun pada teknik percetakannya.

Sebagai ciri-ciri yang terdapat pada uang rupiah tersebut, selain berfungsi sebagai ciri untuk membedakan antara satu pecahan dengan pecahan lainnya, dapat juga berfungsi sebagai alat pengamanan dari ancaman tindak pidana pemalsuan. Alat pengaman tersebut terdiri dari alat pengaman yang kasat mata, kasat raba dan pengamanan yang baru terlihat dengan menggunakan alat bantu berupa sinar ultra violet (*uv lights*), dan sinar infra merah (*infra red lights*). Untuk mengetahui lebih jelas tentang keaslian uang rupiah disini akan diuraikan tentang ciri-ciri yang terdapat pada uang kertas rupiah.

a. Ciri-ciri bahan uang rupiah.

Bahan yang digunakan untuk membuat uang kertas rupiah dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan ciri-ciri tertentu yang ditujukan untuk pengamanan terhadap ancaman tindak pidana pemalsuan uang. Bahan uang tersebut dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu bahan kertas dan plastik (*polymer*). Adapun bahan uang yang berasal dari kertas adalah sebagai berikut:

1) Bahan uang kertas.

Ciri-ciri yang terdapat pada bahan kertas uang terdiri dari:

1. Bahan uang kertas
2. Tanda air (*water merk*)
3. Benang pengaman (*security thread*)
4. *Electrotype*
5. Serat-serat (*vibres*)

2) Bahan plastik (*polymer*)

Ciri-ciri yang terdapat pada bahan plastik terdiri dari:

- 1) Bahan plastik (*polymer*)
- 2) Bayangan gambar (*translucent shadow image*)
- 3) Jendela transparan (*transparent security windows*)
- 4) Jendela berwarna (*color security window*)

b. Ciri-ciri pada desain dan warna uang rupiah.

Desain dan warna uang dari setiap pecahan uang rupiah telah dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan ciri-ciri tertentu, baik untuk keperluan keindahan untuk pengamanan terhadap ancaman tindak pidana pemalsuan uang yang meliputi:

- 1) Gambar utama bagian muka dan bagian belakang.
- 2) Gambar dan ornamen pendukung lainnya.
- 3) Warna dominan uang.
- 4) Ukuran uang.

c. Ciri-ciri teknik cetak uang rupiah

Teknik cetak pada uang rupiah yang dilakukan oleh perusahaan percetakan uang dapat memberikan ciri-ciri tertentu, baik untuk keperluan keindahan maupun untuk pengamanan terhadap ancaman tindak pidana pemalsuan uang. Tinta cetak yang digunakan dalam percetakan uang merupakan *security ink* yang istimewa dibandingkan dengan tinta cetak percetakan security lainnya. teknik cetak tersebut adalah terdiri dari:

- 1) Cetak *intaglio*
- 2) *Rectoverso (see though register)*
- 3) Nomor seri yang memendar
- 4) *Latent image/multilayer latent image*
- 5) Huruf/angka *mikro*
- 6) Hasil cetak yang tidak kasat mata (*invisible ink*)
- 7) Tinta berubah warna (*optical variable ink/ovi*)
- 8) Latar (*screen*)
- 9) *Gilloche*

1.2 Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Terkait

Dalam hal ini bank indonesia bekerja sama dengan pemerintah dan pihak penegak hukum yaitu kepolisian dalam menanggulangi tindak pemalsuan uang rupiah. Disamping itu Bank Indonesia juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain dan yang paling penting bahwa untuk menanggulangi peredaran uang palsu masyarakat harus lebih berperan atau melaporkan apabila menemukan uang tersebut.

Sekarang ini kesadaran masyarakat dalam pelaporan penemuan uang palsu sangat kurang, masyarakat yang menemukan uang palsu tidak mau melaporkan malahan membelanjakan kembali uang tersebut, karena masyarakat tidak mau rugi.

Padalah begitu berpengaruhnya uang palsu jika beredar dimasyarakat akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak baik. Oleh karena itu Bank Indonesia harus bekerja ekstra untuk memberantas pemalsuan uang rupiah.

Tata cara pelaporan penemuan uang palsu sangat mudah, yaitu:

- a. Masyarakat umum:
 - o Lapor/serahkan ke Bank Indonesia/Bank/Kepolisian.
- b. Bank Umum:
 - o Tahan uang dan tidak boleh dikembalikan.
 - o Catat identitas penyeter/pelapor.
 - o Membuat laporan ke Bank Indonesia.
 - o Tidak merusak fisik uang.

2. Tindakan yang bersifat represif

Sedangkan tindakan yang bersifat represif adalah melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan penangkapan dan pemerosesan kasus-kasus tidak pidana pemalsuan uang rupiah.

Dalam hal ini Bank Indonesia terus meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga yang lainnya, disamping itu Bank Indonesia juga memberikan pemahaman dan pentingnya dalam menjaga uang rupiah khususnya masyarakat.

Dalam undang-undang telah jelas disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja meniru atau memalsukan uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah

maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 244 KUHP atau pasal IX UU No. 1 tahun 1946.

Disamping Bank Indonesia melakukan usaha yang bersifat preventif dan represif, Bank Indonesia juga memberikan tips yang mudah membedakan uang asli dan uang palsu

Tips membedakan uang asli dan uang palsu :

Uang palsu adalah uang yang dicetak atau dibuat oleh perorangan maupun perkumpulan/sindiket tertentu dengan tujuan uang palsu hasil cetakannya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana mestinya. Untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan melihat perbedaan antara uang yang asli dengan uang yang palsu diperlukan teknik analisis yang cukup sederhana dan bisa dilakukan siapa saja dengan mudah. Caranya adalah dengan 3D yaitu:

a. Dilihat.

Lihatlah uang yang anda miliki apakah warnanya pudar, kusam, pucat, luntur, patah-patah, atau masalah lainnya. Pastikan uang yang anda periksa tadi memiliki warna, corak dan gambar yang baik serta memiliki tanda-tanda uang asli seperti tanda air yang menggambarkan pahlawan nasional, bahan kertas serta benang tali pengaman yang berada didalam uang tersebut.

b. Diraba.

Usaplah uang tersebut apakah uang itu terasa kasar atau lembut. Uang yang asli biasanya agak kaku dan tebal bahan kertasnya. Disamping itu pada angka atau gambar uang biasanya sengaja dicetak agak menonjol dan akan terasa jika diusap-usap.

c. Diterawang.

Langkah yang terakhir adalah menerawangkannya kesumber cahaya kuat seperti matahari dan lampu, setelah diterawang lihatlah bagian tali pengaman dan tanda mata air apakah dalam kondisi baik atau tidak.

Saat ini sudah ada alat yang dapat memeriksa apakah uang itu asli atau palsu. Anda bisa menggunakan alat yang memancarkan sinar ultra violet untuk menentukan uang itu asli atau palsu, anda bisa mencari alat deteksi uang palsu tersebut dibanyak tempat. Yang anda butuhkan hanyalah menyalakan alat tersebut dan mendekatkan bagian tertentu dengan uang yang diperiksa. Uang yang asli akan menampilkan sesuatu yang memendar cahaya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bank Indonesia telah melakukan usaha-usaha mengantisipasi ancaman tindak pidana pemalsuan uang rupiah, yaitu yang bersifat preventif maupun bersifat represif.
2. Sifat preventif adalah tindakan pencegahan terhadap tindak pidana pemalsuan uang rupiah, sedangkan sifat represif adalah penanggulangan akan tindak pemalsuan uang rupiah.
3. Adapun tindakan yang bersifat preventif adalah meliputi:
 - a. Memasyarakatkan ciri-ciri keaslian uang rupiah.
 - b. Meningkatkan tanda-tanda pengaman pada uang rupiah baru.
 - c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
 - d. Meningkatkan kerjasama internasional.
4. Sedangkan tindakan yang bersifat represif adalah melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan penangkapan dan pemerosesan kasus-kasus tindak pidana pemalsuan uang rupiah.
5. Peredaran uang palsu di masyarakat cukup sulit untuk diberantas. Hal ini didorong oleh perilaku masyarakat yang kurang mendukung upaya pemerintah dalam rangka mengurangi peredaran uang palsu. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya uang palsu sangat

kurang. Bila mereka mendapatkan uang palsu, mereka cenderung membelanjakannya. Hal ini tidak dapat memotong mata rantai peredaran uang palsu. Masyarakat justru ikut berperan dalam mengedarkan uang palsu.

6. Perkembangan teknologi juga ikut berperan dalam melancarkan tindak pidana pemalsuan uang. Perkembangan teknologi disalahgunakan oleh sekelompok orang untuk melakukan tindakan kriminal. Apalagi peralatan pendukung kegiatan tersebut sangat mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau pula. Tentu saja kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pada perkembangan teknologi, karena dalam hal ini faktor perilaku manusia sangat menentukan.
7. Untuk menanggulangi peredaran uang palsu dinegara kita pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah karena uang palsu sangat merugikan perekonomian negara.

B. Saran

Pada bagian ini, terdapat beberapa saran untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang, antara lain :

1. Pemerintah harus memproses kasus pemalsuan uang secara tuntas keakar-akarnya supaya tidak muncul kasus pemalsuan uang.

2. Pemerintah harus lebih tegas, berkomitmen, dan konsisten terhadap peraturan yang telah dibuat untuk memberantas tindak pidana pemalsuan uang.
3. Pemerintah perlu menyiapkan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera.
4. Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah perlu mengadakan kerja sama dengan masyarakat. Dalam kasus pemalsuan uang, sikap dan sifat masyarakat memegang kunci penting. Kesadaran masyarakat akan tindak pidana tersebut perlu diperbaiki, sehingga bila masyarakat menemukan uang palsu, mereka cenderung akan melaporkan kepada pihak yang berwajib daripada membelanjakannya. pada akhirnya, uang palsu yang beredar di masyarakat dapat ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

- Booklet Bank Indonesia, *Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan*, Jakarta, 2006
- Bank Indonesia, *Undang-undang republic Indonesia No 23 Th 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia no 3, 2004*, Jakart, 2004
- Didik, Suwidi, Tono dkk, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, PT. Mardi Mulyo, Jakarta, 2000
- Sainungan Muchdarsyah, *Manajemen Dana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- Agus Riswandi. Budi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Alfa Riau, Pekanbaru, 2007
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Bank Indonesia, *Kumpulan dan Ketentuan Sistem Informasi Debitur*, Direktorat dan Pengaturan Perbankan, Jakarta, 2005
- Syaril & Djasni, Salim, *ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999
- Bank Indonesia, *Ciri-ciri Uang Rupiah*, Pekanbaru, 2005
- Booklet Bank Indonesia : *Kenali Rupiah Anda*, Direktorat Pengedaran Uang, Jakarta, 2006

- Ashadi, Muhammad, *Sejarah Bank Indonesia periode II 1959-1966 Bank Indonesia Pada Masa Ekonomi Terpimpin*, Penerbit Bank Indonesia, 2005
- Wijaya, Farid, *Perkreditan, Bank dan Lembaga Keuangan*, BPFE Yogyakarta, 1999
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, BPFE Yogyakarta, 1999
- Fabozzi, Frank. Modigliani. Franco, Ferri. *Pasar dan Lembaga Keuangan*, Salemba Empat, 1999
- Hasibuan, Malayu, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Indara, Ismawan, *Money Politic*, Media Pressindo, Yogyakarta, 1999
- Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007